

**KEBIJAKAN PENERAPAN KURIKULUM
SEKOLAH DASAR (SD) DI INDONESIA**

Mata Kuliah : Telaah Kurikulum
Kode Mata Kuliah : KPD620209
Jumlah SKS : II/2 SKS
Semester : 3 (Tiga)
Kelas : B1
Dosen Pengampu : 1. Drs. Maman Surahma, M.Pd.
2. Sheren Dwi Oktaria, M.Pd.
3. Alif Luthvi Azizah, M.Pd.

Disusun Oleh:

Kelompok 7

1. Annisa Salsabina R. (2113053014)
2. Diah Nur Aisyah (2113053065)
3. Ni Wayan Linda Maharani (2113053181)
4. Linda Oktavia (2113053037)



**S1 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022/2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “*Kebijakan Penerapan Kurikulum Sekolah Dasar (SD) di Indonesia*” tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam kesempatan kali ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Drs. Maman Surahma, M.Pd., Sheren Dwi Oktaria, M.Pd., dan Alif Luthvi Azizah, M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum,
2. Serta rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dalam proses penyusunan makalah ini.

Penyusun berharap, semua pihak dapat memanfaatkan makalah ini dengan baik. Penyusun juga menyadari bahwa makalah ini masih perlu ditingkatkan baik isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

Metro, September 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Kebijakan Kurikulum 1994.....	3
2.2 Kebijakan Kurikulum 2004.....	7
2.3 Kebijakan KTSP 2006.....	16
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	23
3.2 Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Pendidikan di Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya faktor, salah satunya ialah penyempurnaan kurikulum. Dalam proses pelaksanaannya tidak dipungkiri pasti ada dampaknya. Sehingga mau tidak mau guru maupun siswa harus mampu menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan baru.

Kebijakan kurikulum di Indonesia yang sering berubah merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia. Namun, saat ini ketika membicarakan kembali tentang kondisi Pendidikan di Indonesia apalagi mengenai kurikulum. Maka akan menemui masalah yang sama, walaupun telah beragam kurikulum yang pernah ada di Indonesia ternyata masih belum mampu memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia. Kondisi seperti diatas ditandai oleh rendahnya mutu kelulusan, fasilitas, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Pendidikan di Indonesia pernah melaksanakan kebijakan kurikulum 1994, kurikulum 2004 dan KTSP 2006. Namun, kurikulum yang pertama dilaksanakan di Indonesia adalah rencana pelajaran 1947, ketika itulah istilah kurikulum belum digunakan. Rencana pelajaran berubah menjadi istilah kurikulum pada saat kurikulum 1968. Namun disini, kita akan membahas mengenai kurikulum 1994, kurikulum yang berbasis kompetensi yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Kurikulum 1994?
2. Bagaimana kebijakan Kurikulum 2004?
3. Bagaimana kebijakan KTSP 2006?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Kurikulum 1994 tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Kurikulum 2004 tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan KTSP 2006 tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan Kurikulum 1994

A. Sejarah Kurikulum 1994

Pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984, proses pembelajaran menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dengan kurang memperhatikan muatan (isi) pelajaran. Hal ini terjadi karena berkesesuaian suasana pendidikan di LPTK (lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) pun lebih mengutamakan teori tentang proses belajar mengajar. Akibatnya, pada saat itu dibentuklah Tim Basic Science yang salah satu tugasnya ikut mengembangkan kurikulum di sekolah. Tim ini memandang bahwa materi (isi) pelajaran harus diberikan cukup banyak kepada siswa, sehingga siswa selesai mengikuti pelajaran pada periode tertentu akan mendapatkan materi pelajaran yang cukup banyak.

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.

B. Ciri-Ciri Kurikulum 1994

Pada kurikulum tahun 1994 model administratif disebut dengan model garis staff atas ke bawah. Karena inisiatif dan gagasan datang dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat yang menyusun kurikulum yang

akan dijalankan oleh setiap satuan pendidikan. Guru hanya sekedar menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kurikulum tahun 1994, pembelajaran matematika mempunyai karakter yang khas, struktur materi sudah disesuaikan dengan psikologi perkembangan anak, materi keahlian seperti komputer semakin mendalam, model-model pembelajaran matematika kehidupan disajikan dalam berbagai pokok bahasan. Intinya pembelajaran matematika saat itu mengedepankan tekstual materi namun tidak melupakan hal-hal kontekstual yang berkaitan dengan materi. Soal cerita menjadi sajian menarik disetiap akhir pokok bahasan, hal ini diberikan dengan pertimbangan agar siswa mampu menyelesaikan permasalahan kehidupanyang dihadapi sehari-hari.

Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut :

- a. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan
- b. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat (berorientasi kepada materi pelajaran/isi). Dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.
- c. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
- d. Proses pembelajaran berpusat pada guru.
- e. Evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif.

C. Tujuan Kurikulum 1994

Tujuan Nasional : Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur,

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Pasal 4 Undang – Undang Nomor 2 Thun 1989).

D. Permasalahan Kurikulum 1994

Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (content oriented), di antaranya sebagai berikut :

1. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran.
2. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari.
3. Proses pembelajaran bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pelajaran, guru sebagai pusat pembelajaran. Target pembelajaran pada penyampaian materi.
4. Evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan atas dasar perolehan nilai yang dapat diperbandingkan dengan nilai siswa lain. Ujian hanya menggunakan teknik paper and pencil test.

Permasalahan di atas terasa saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 1994. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya penyempurnaan itu diberlakukannya Suplemen Kurikulum 1999. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu

1. Penyempurnaan kurikulum secara terus menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan masyarakat.

2. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya.
3. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa.
4. Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek terkait, seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana/prasarana termasuk buku pelajaran.
5. Penyempurnaan kurikulum tidak mempersulit guru dalam mengimplementasikannya dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah

Penyempurnaan kurikulum 1994 di pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan bertahap, yaitu tahap penyempurnaan jangka pendek dan penyempurnaan jangka panjang. Usaha pemerintah maupun pihak swasta dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama meningkatkan hasil belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran terus menerus dilakukan, seperti penyempurnaan kurikulum, materi pelajaran, dan proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh praktisi pendidikan, khususnya dalam mata pelajaran matematika mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran matematika di jenjang persekolahan merupakan suatu kegiatan yang harus dikaji terus menerus dan jika perlu diperbaharui agar dapat sesuai dengan kemampuan murid serta tuntutan lingkungan.

Implementasi pendidikan di sekolah mengacu pada seperangkat kurikulum. Salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan pemerintah guna meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan inovasi di bidang kurikulum. Kurikulum 1994 perlu disempurnakan lagi sebagai respon terhadap perubahan struktural dalam pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

2.2 Kebijakan Kurikulum 2004

A. Sejarah Kurikulum Berbasis Kompetensi : Kurikulum 2004

Kurikulum pendidikan yang berlaku pada tahun 2004 adalah kurikulum 2004 atau biasa disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah konsep kurikulum yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional RI untuk menggantikan Kurikulum 1994. Kurikulum ini dirancang sejak tahun 2000 dan diterapkan pada tahun 2004. KBK merupakan salah satu bentuk inovasi kurikulum karena adanya semangat reformasi pendidikan. Hal ini diawali dengan kebijakan pemerintah dalam pemerintahan daerah atau dikenal dengan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Munculnya kebijakan pemerintahan tersebut didorong oleh perubahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam dimensi globalisasi yang ditandai dengan munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat sehingga kehidupan penuh persaingan pada segi apapun. Oleh karena itu pada kurikulum berbasis kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggungjawab.

B. Konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan mengembangkan sekolah (Depdiknas, 2002). KBK dikembangkan untuk memberikan keahlian dan keterampilan sesuai standar kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing di tengah-tengah perubahan, persaingan, dan permasalahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Secara umum Kurikulum 2004 menitikberatkan pada

1. Pencapaian target kompetensi (attainment targets) daripada penguasaan materi,
2. Mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidikan yang tersedia
3. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pelaksana pendidikan di lapangan untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Kompetensi sendiri merupakan kemampuan mengerjakan sesuatu yang berbeda dengan sekedar mengetahui sesuatu. Kompetensi harus didemonstrasikan sesuai dengan standar yang ada di lapangan kerja. Menurut Gordon (dalam Sa'ud, 2008: 91) terdapat 6 aspek yang harus terkandung dalam kompetensi, yaitu:

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu pengetahuan untuk melakukan proses berpikir
2. Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki individu
3. Keterampilan (skill), yaitu sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas yang dibebankan
4. Nilai (value), yaitu dasar standar perilaku yang telah diyakini sehingga akan mewarnai dalam segala tindakan
5. Sikap (attitude), yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsang yang datang dari luar, perasaan senang tidak senang terhadap suatu masalah
6. Minat (interest), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan untuk mempelajari materi pelajaran.

Sanjaya (2005) menyatakan bahwa terdapat 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa, yaitu :

1. Kompetensi akademik, yaitu peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi tantangan dan persoalan hidup
2. Kompetensi okupasional, yaitu peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja
3. Kompetensi kultural, yaitu peserta didik harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat
4. Kompetensi temporal, yaitu peserta didik tetap eksis dalam menjalani kehidupannya sesuai tuntutan perkembangan zaman.

Menurut Boediono (2002), Kurikulum Berbasis Kompetensi terdiri atas empat komponen utama, yaitu

- a. Kurikulum dan Hasil Belajar;
- b. Penilaian Berbasis Kelas,
- c. Kegiatan Belajar Mengajar, dan
- d. Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah.

Keempat komponen utama KBK ini merupakan suatu kesatuan yang menggambarkan seluruh rangkaian masa persekolahan. Sehingga jelaslah bahwa Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan suatu yang mengembangkan pembelajaran dan program pengajaran sesuai dengan tuntutan kehidupan, keadaan sekolah, dan kebutuhan siswa.

Perlu diingat bahwa Kurikulum 2004 pada dasarnya tidak lagi menonjolkan isi atau materi pelajaran, akan tetapi menempatkan pengalaman belajar untuk membentuk kemampuan sebagai arah pengembangan kurikulum, maka dalam implementasinya kurikulum lebih menekankan kepada proses belajar. Pengelolaan pembelajaran tidak lagi didesain untuk memberikan sejumlah informasi kepada siswa untuk dicatat dan dihapal, akan tetapi pengelolaan pembelajaran didesai bagaimana siswa dapat menemukan informasi yang dibutuhkan. Dalam konteks “menemukan“ itulah pembelajaran dapat membekali siswa sejumlah kemampuan atau kompetensi, misalnya kompetensi berpikir,

kompetensi bekerja keras, kompetensi mengakses informasi, mencari data dan lain sebagainya.

C. Karakteristik Kurikulum Berbasis Kompetensi

Depdiknas (2002) mengemukakan karakteristik KBK sebagai berikut :

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. KBK memuat sejumlah kompetensi yang harus dicapai siswa dan kompetensi tersebut sebagai standar minimal atau kemampuan dasar.
2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, artinya keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Indikator inilah yang dijadikan acuan kompetensi yang diharapkan. Proses pencapaian bergantung pada kemampuan dan kecepatan yang berbeda pada setiap siswa.
3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa.
4. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif, artinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Guru berperan sebagai fasilitator untuk mempermudah siswa belajar dari berbagai macam sumber belajar.
5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. KBK menempatkan hasil dan proses belajar sebagai dua sisi yang sama pentingnya.

Di samping itu, KBK sebagai sebuah kurikulum memiliki tiga karakteristik utama.

1. Pertama, KBK memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Artinya melalui KBK diharapkan siswa memiliki kemampuan standar minimal yang harus dikuasai.

2. Kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan pada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Dalam pembelajaran tidak sekedar diarahkan untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana materi itu dapat menunjang dan mempengaruhi kemampuan berfikir dan kemampuan bertindak sehari-hari. Jadi dengan demikian , implementasi kurikulum berbasis kompetensi, benar-benar menempatkan siswa sebagai subjek belajar atau yang kita kenal dengan student oriented
3. Ketiga, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Kedua sisi evaluasi itu sama pentingnya sehingga pencapaian standar kompetensi dilakukan secara utuh yang tidak hanya mengukur aspek pengetahuan saja, tetapi sikap dan keterampilan.

D. Adapun Kelebihan dan Kelemahan dari kurikulum 2004

➤ Kelebihan

1. Dapat dijadikan acuan secara nasional dalam mengembangkan mata pelajaran di masing-masing daerah,
2. Memudahkan daerah untuk mengembangkan mata pelajaran sesuai dengan lingkungannya,
3. Memberi peluang kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensinya,
4. Memudahkan guru dalam menentukan materi pembelajaran, dan meningkatkan kreativitas guru dalam proses belajar, dan memudahkan sistem evaluasi.

➤ Kelemahan

1. Dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan.
2. Konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan.

3. Paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented.
4. Sistem pengukuran perilaku yang menggunakan paradigma behaviorisme ditengarai tidak mampu mengukur sesuatu perilaku yang dihasilkan dari pembelajaran bermakna (significant learning) (Barrie dan Pace,1997)
5. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan KBK adalah waktu,biaya dan tenaga yang banyak.

E. Kurikulum 2004 dan Keleluasaan Guru dalam Pengembangannya

Kurikulum yang berbasis kompetensi ini memberikan keleluasaan kepada lembaga Sekolah untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasi potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. Di sinilah kunci adanya pelimpahan kewenangan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum 2004. Wujud atau komponen yang diserahkan sepenuhnya kepada guru ada dalam perumusan silabus atau perencanaan pembelajaran serta skenario pembelajaran yang berisi formulasi pendekatan pembelajaran untuk melaksanakan kurikulum di depan kelas.

Keleluasaan guru dalam pengembangan kurikulum 2004 bersumber dari pemberlakuan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Dalam buku panduannya, MPMBS diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan keluwesan-keluwesannya kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan lain-lain) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi yang lebih besar tersebut, diharapkan sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan memandiriannya, sekolah lebih

berdaya dalam mengembangkan program-program yang, tentu saja, lebih sesuai dengan dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya.

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Indonesia diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan. Artinya MBS yang aslinya untuk meningkatkan semua kinerja sekolah yaitu meningkatkan efektivitas, kualitas/mutu, efisiensi, inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses pendidikan belum akan dilaksanakan semuanya.

Dalam rancangannya, MBS di Indonesia hanya difokuskan kepada peningkatan mutu pendidikan, karena itu konsep yang lahir adalah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Namun demikian mekanismenya tidak jauh berbeda dengan MBS secara keseluruhan target. Dalam buku panduan, MPMBS diartikan sebagai model manajemen yang memberrikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong partisipasi langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dll) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam MPMBS, fungsi-fungsi yang didesentralisasikan ke sekolah dalam manajemen berbasis sekolah ini meliputi sembilan unsur manajemen sekolah dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan proses belajar mengajar, sekolah diberi peluang untuk memilih strategi, metode dan teknik-teknik pembelajaran yang paling efektif sesuai kondisi sumberdaya pendidikan yang ada.
2. Dalam perencanaan dan evaluasi, sekolah diberi kewenangan merencanakan kegiatannya sesuai kebutuhannya (school based plan) dan mengevaluasinya sendiri.
3. Dalam pengelolaan kurikulum, sekolah hanya diperbolehkan dalam hal memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi tetapi tidak mengurangi isi kurikulum yang berlaklu secara nasional.
4. Dalam pengelolaan ketenagaan, sekolah diberi keleluasaan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah dan

hukuman, kecuali menyangkut pengupahan dan rekrutmen guru pegawai negeri.

5. Dalam pengelolaan fasilitas seluruhnya menjadi kewenangan sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, serta pengembangan.
6. Dalam pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian uang sepenuhnya dilakukan sekolah. Sekolah juga diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan.
7. Dalam pelayanan siswa, hubungan sekolah – masyarakat dan pengelolaan iklim menjadi kewenangan sepenuhnya pihak sekolah.

Berdasarkan tujuh fungsi yang didesentralisasikan, pengembangan kurikulum 2004 telah menjadi "hak" guru untuk dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebijakan pada tingkat sekolah. Karena itu, secara bertahap pemerintah pusat terus melatih dan mensosialisasikan "instrumen" pendelegasian wewenang pusat melalui kebebasan guru dalam merumusan silabus dan skenario pembelajaran. Pembelajaran guru dituntut untuk lebih kreatif menyesuaikan diri dengan lingkungan sumber belajar sekolah masing-masing.

F. Implikasi KBK terhadap Pengembangan Aspek Pembelajaran

1. Pengembangan Rancangan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dalam KBK diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Proses pembelajaran berorientasi pada siswa sebagai subjek pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang pembelajar, antara lain (Sa'ud, 2008: 98) :

- a. Rancangan kegiatan pembelajaran harus memberikan kesempatan pada siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan sendiri pengetahuannya. Kegiatan pembelajaran dirancang agar siswa dapat mengembangkan keterampilan dasar mata pelajaran yang bersangkutan.

- b. Rancangan pembelajaran harus disesuaikan dengan sumber belajar dan saran pembelajaran.
- c. Pembelajaran harus dirancang dengan mengordinasikan berbagai pendekatan belajar.
- d. Pembelajaran harus dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan individual peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan lain-lain.

2. Pengembangan Proses Pembelajaran

Belajar yang diinginkan KBK, bukan menumpuk ilmu pengetahuan tetapi proses perubahan perilaku melalui pengalaman belajar dan diharapkan terjadi pengembangan berbagai aspek pada setiap peserta didik. Guru bertugas mengelola pembelajaran baik dalam pengembangan strategi pembelajaran maupun menggunakan berbagai sumber belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya diarahkan agar siswa mampu menguasai materi pembelajaran tetapi lebih diarahkan pada penguasaan kompetensi sesuai kurikulum.

3. Pengembangan Evaluasi

Kriteria keberhasilan belajar siswa meliputi : aspek kognitif , afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan kecerdasan dan intelektual siswa. Aspek afektif berhubungan dengan penilaian sikap dan minat siswa terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Aspek psikomotor berhubungan dengan tingkat penguasaan pengetahuan dalam bentuk praktek. Bentuk penilaian menggunakan instrument tes dan non tes secara seimbang dengan fungsi formatif maupun sumatif.

G. Menumbuhkan Keberanian Guru dalam Pengembangan Kurikulum 2004

Masalah utama adalah kegagalan guru dalam melaksanakan tugas yang diakibatkan kurangnya pemahaman tentang karakteristik kurikulum 2004 dan juga terjebak oleh budaya birokratik. Hambatan ini menimbulkan kurangnya keberanian guru dalam mengembangkan

kurikulum 2004 secara lebih inovatif. Pertanyaannya bagaimana menumbuhkan kembali keberanian guru agar mereka lebih baik dalam menjalankan tugasnya.

Dilihat dari hambatan di atas maka jalan yang dianggap efektif antara lain

1. Memberi penguatan kepada guru melalui pendidikan atau pelatihan untuk memberi pemahaman yang benar tentang kurikulum 2004 dan cara-cara pengembangannya.
2. Di setiap sekolah dan dinas pendidikan kota/kabupaten harus memiliki komunitas pengembang kurikulum dan salah satu anggotanya harus berlatar belakang sarjana kurikulum. Mereka harus berperan dalam memberi dorongan pada setiap pengembangan kurikulum. Dengan tim pengembang kurikulum ini, secara bertahap akan memberi keyakinan kepada guru untuk berani tampil mandiri dan utuh dan sedikit demi sedikit melepaskan diri dari ketergantungan petunjuk-petunjuk teknis yang terlalu rinci dari pusat
3. Memberi penghargaan kepada guru yang melahirkan inovasi-inovasi dan atau apresiasi yang unggul dari upayanya mengembangkan kurikulum 2004. Sejak kemerdekaan republik ini, penghargaan terhadap guru yang melahirkan model-model pembelajaran dan atau inovasi pendidikan lainnya sangat kurang bahkan hampir tidak ada. Guru yang melakukan inovasi dalam pembelajaran di kelas, pada jaman sebelum Kurikulum 2004 hampir-hampir dituduh sebagai pelaksana teknis yang tidak taat aturan.

2.3 Kebijakan KTSP 2006

Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu mengamanatkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia antara lain untuk mencerdaskan bangsa. Untuk mewujudkannya, pasal 31 ayat (3) memerintahkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system Pendidikan Nasional. Yang didalamnya tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan bangsa. Sesuai dengan amanat tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang

Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar Hukum untuk membangun Pendidikan dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, dan otonomi Pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam sumber daya Pendidikan, perlu adanya kurikulum yang berbasis pada kompetensi sebagai sesuai kompetensi sebagai instrument mengarahkan peserta didik agar menjadi: (1) manusia yang berkualitas agar mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; (2) manusia yang terdidik; beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berdasarkan hal diatas, pengembangan kurikulum memang harus mengikuti perkembangan zaman.

Setiap kurikulum pasti strategi pembelajaran didalamnya ada perbedaan, penyajian materi atau pengetahuannya juga berbeda. Landasan utama kebijakan pengembangan kurikulum Pendidikan dasar di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang secara tegas tampak dalam kebijakan kurikulum 2006 yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP disusun dan diimplementasikan pada satuan Pendidikan. Kurikulum ini meliputi tujuan sekolah dasar, struktur dan muatan kurikulum sekolah dasar, kalender Pendidikan, dan silabus. Kurikulum digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan dalam berbagai jenjang.

A. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Robert Zais (1976:7) menjelaskan bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau untuk memperoleh ijazah. Hass (1987) (siraj, 2008 :1) mengatakan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman yang diperoleh oleh setiap individu pelajar dalam suatu

program pendidikan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang lebih luas serta tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan yang telah dirancang dalam bentuk suatu teori rangka kerja serta kajian ataupun amalan professional pada masa lalu dan masa kini.

Kebijakan dan penerapan KTSP sebagai penyempurnaan KBK menurut Baedhowi (2007:172) memiliki latarbelakang, antara lain:

- a) Kurikulum-kurikulum yang disusun secara nasional selama ini mengalami banyak kendala disekolah. Karena kurang menyentuk karakteristik dan potensi masyarakat dan juga peserta didik.
- b) Adanya keinginan masyarakat untuk mendekatkan pengembangan kurikulum kepada satuan Pendidikan sebagai center of teaching learning process kurikulum
- c) Adanya keinginan untuk memberdayakan sumber daya yang ada untuk berperan saat penyusunan kurikulum.
- d) Sejalan dengan otonomi daerah Pendidikan atau pemerintahan pusat yang lebih banyak berperan dalam penyusunan standar Pendidikan.

B. Ciri-ciri kurikulum 2006/KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) KTSP memberi kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program Pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, sumber daya yang tersedia dan juga kekhasan daerah.
- b) Orangtua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
- c) Guru harus mandiri dan kreatif
- d) Guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran.

Selain itu, dibawah ini terdapat ciri terpenting dari KTSP adalah sebagai berikut:

- a) KTSP menganut prinsip Fleksibilitas
- b) KTSP membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama yakni pada kebergantungan pada birokrat.
- c) Guru kreatif dan siswa aktif
- d) KTSP dikembangkan dengan prinsip diversifikasi
- e) KTSP sejalan dengan konsep desentralisasi dan MBS (Management Berbasis Sekolah)
- f) KTSP tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni
- g) KTSP beragam dan terpadu

C. Komponen-Komponen KTSP

Kurikulum dapat diartikan sebagai suatu sistem terdiri dari unsur-unsur yang disebut sebagai komponen kurikulum. Ada empat komponen berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yaitu sebagai berikut:

- a) Tujuan Pendidikan tingkat satuan Pendidikan
 Tujuannya adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- b) Struktur dan muatan KTSP
 Yang dimaksud dengan struktur kurikulum ialah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Struktur KTSP terdiri dari komponen mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan, Pendidikan kecakapan hidup, dan Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
 - Komponen mata pelajaran meliputi : Pendidikan agama, Pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan

Alam, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Olahraga dan Kesehatan

- Muatan lokal ialah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas. Contohnya : Pendidikan lingkungan hidup.
- Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan serta mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat sesuai dengan kondisi sekolah. Contoh : kegiatan kepramukaan, kegiatan PMR, dan lainnya.
- Pendidikan kecakapan hidup mencakup kecakapan pribadi, social, akademik. Kecakapan hidup ini adalah bagian integral dari Pendidikan semua mata pelajaran yang direncanakan secara khusus.
- Ketuntasan Belajar didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya : input peserta didik, tingkat esensial dari masing-masing Mata Pelajaran, kemampuan daya dukung dan kompleksitas tiap-tiap mata pelajaran.
- Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah Pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain lain yang dapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.

c) Kalender Pendidikan

Kalender Pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, waktu pembelajaran efektif, minggu efektif belajar, dan hari libur.

d) Silabus dan RPP

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran,

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar (Kunandar, 2011: 244). RPP mencakup secara keseluruhan yang tertuang pada langkah-langkah pembelajaran yang umumnya hanya disusun untuk setiap pertemuan atau per Bab.

D. Kelebihan dan Kelemahan KTSP

Setiap kurikulum memiliki kelebihan maupun kelemahannya masing-masing tergantung kondisi dan situasi dimana kurikulum tersebut diberlakukan. Dibawah ini terdapat kelebihan dan kelemahan KTSP yaitu sebagai berikut:

- **Kelebihan KTSP**

Adapun kelebihan KTSP adalah sebagai berikut:

- a) KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang askeptabel bagi peserta didik.
- b) Guru, kepala sekolah, dan juga pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam proses penyelenggaraan program pendidikan.
- c) Kelebihan KTSP mengurangi beban belajar siswa yang dilihat sangat padat.
- d) KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan.

- **Kelemahan KTSP**

Beberapa kelemahan dalam KTSP adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya ketersediaan sarana maupun prasarana yang mendukung.
- b) Masih banyak guru yang belum memahami atau kurang memahami KTSP secara komprehensif baik itu konsep penyusunan maupun prakteknya sendiri.
- c) KTSP dalam penerapannya merekomendasikan pengurangan jam pelajaran yang akan berdampak pada pendapatan para guru.

Dapat disimpulkan bahwa beberapa kelebihan KTSP merupakan faktor pendukung bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Untuk faktor kelemahannya merupakan faktor penghambat yang harus segera diantisipasi bahkan diatasi oleh pihak sekolah dan juga menjadi perhatian bagi pihak pemerintah.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.

Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah konsep kurikulum yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional RI untuk menggantikan Kurikulum 1994. Kurikulum ini dirancang sejak tahun 2000 dan diterapkan pada tahun 2004. KBK merupakan salah satu bentuk inovasi kurikulum karena adanya semangat reformasi pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan dengan tanggungjawab. Kurikulum 2004 pada dasarnya tidak lagi menonjolkan isi atau materi pelajaran, akan tetapi menempatkan pengalaman belajar untuk membentuk kemampuan sebagai arah pengembangan kurikulum, maka dalam implementasinya kurikulum lebih menekankan kepada proses belajar. Pengelolaan pembelajaran tidak lagi didesain untuk memberikan sejumlah informasi kepada siswa untuk dicatat dan dihapal, akan tetapi pengelolaan pembelajaran didesain bagaimana siswa dapat menemukan informasi yang dibutuhkan. Dalam konteks “menemukan“ itulah pembelajaran dapat

membekali siswa sejumlah kemampuan atau kompetensi, misalnya kompetensi berpikir, kompetensi bekerja keras, kompetensi mengakses informasi, mencari data dan lain sebagainya.

Landasan utama kebijakan pengembangan kurikulum Pendidikan dasar di Indonesia adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang secara tegas tampak dalam kebijakan kurikulum 2006 yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP disusun dan diimplementasikan pada satuan Pendidikan. Kurikulum ini meliputi tujuan sekolah dasar, struktur dan muatan kurikulum sekolah dasar, kalender pendidikan, dan silabus. Kurikulum digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dalam berbagai jenjang. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.

3.2 Saran

Kebutuhan pendidikan kini semakin kompleks, begitu juga dengan kebutuhan kurikulum yang ada juga semakin berkembang. Maka disarankan agar tiap sekolah atau lembaga pendidikan menerapkan suatu sistem kurikulum yang berlaku saat itu juga, karena kurikulum yang terbaru merupakan perbaikan dari kurikulum sebelum sebelumnya. Kurikulum dibuat tidak dengan begitu saja, melainkan dengan proses penelitian terhadap prestasi dan kemampuan siswa.

Dalam memberlakukan kurikulum sudah selayaknya pihak pengembang kurikulum mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi daerahnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Dengan melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan masanya tentunya akan dapat meningkatkan prestasi siswa-siswi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, U., Rifma, R., & Syahril, S. (2021). *Konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2200-2205.
- Titinmath. (2012). *MAKALAH TENTANG KURIKULUM DI INDONESIA*. Diakses di <https://titinmath.wordpress.com/2012/01/13/makalah-tentang-kurikulum-di-indonesia/>, pada tanggal 01 September 2022, pukul 10.12 WIB.
- Dadi, F. B. *KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI SEKOLAH DASAR*. Diakses di <https://docplayer.info/211009953-Kebijakan-pengembangan-kurikulum-di-sekolah-dasar.html>, pada tanggal 01 September 2022, pukul 12.02 WIB.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., & Budianto, J. (2022). *MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DALAM MENJAMIN TERLAKSANANYA PENDIDIKAN YANG BAIK BERDASARKAN PASAL 31 AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)*. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 2(2).
- Clayton, Ronald F. (2022). *Ciri-ciri Kurikulum KTSP*. Diakses pada tanggal 01 September 2022.
- Nimda. (2019). *Kenali Apa itu Silabus*. Diakses di <https://www.teknik.unpas.ac.id/blogs/kenali-apa-itu-silabus/>, pada tanggal 02 September 2022, pukul 09.45 WIB.
- Sutriani, N M. (2012). *Proses Pembelajaran dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Diakses di <https://mdsutriani.wordpress.com/2012/06/23/proses-pembelajaran-dengan-kurikulum-tingkat-satuan-pendidikan-ktsp/>, pada tanggal 02 September 2022, pukul 11.22 WIB.

Edi, Elisa. 2021. *Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia Kurikulum 2004 (KBK)*. Diakses di [https://educhannel.id/blog/artikel/kurikulum-2004-\(kbbk\).html](https://educhannel.id/blog/artikel/kurikulum-2004-(kbbk).html), pada tanggal 31 Agustus 2022, pukul 16.32 WIB.

Noor, Eka. 2012. *KELEMAHAN DAN KELEBIHAN KBK DAN KTSP*. Diakses di <http://noor-ekha.blogspot.com/2012/07/kelemahan-dan-kelebihan-kbk-dan-ktsp.html>, pada tanggal 31 Agustus, pukul 17.31 WIB.

Ahmad, D. 2016. *Kurikulum Berbasis Kompetensi : Kurikulum 2004*. Diakses di <https://eurekapendidikan.com/berbasis-kompetensi-kurikulum-2004>, pada tanggal 01 September 2022, pukul 19.04 WIB.

Ahmad, Y. *MPLEMENTASI KURIKULUM 2004 DAN RESISTENSI BUDAYA BIROKRATIK*. Diakes di http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/196708121997021-AHMAD_YANI/IMPLEMENTASI_KURIKULUM_2004.pdf, pada tanggal 01 September , pukul 20.42 WIB.

Arfors. 2016. *Makalah Kurikulum 1994*. Diakses di <http://arfors.blogspot.com/2016/02/makalah-kurikulum-1994.html?m=1>, pada tanggal 01 September, pukul 21.52 WIB.

Eli Mufidah. 2018. *PERKEMBANGAN KURIKULUM MENJADI RUJUKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA*. CENDEKIA: Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam p-ISSN: 2086-0641 Volume 10, No. 01, Maret 2018, Hal. 53-68